

**Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Tahun 2020-2024**

Area Perubahan	No.	Indikator	Tipe yang diukur	Uraian Indikator	Aksi									
					2020	2021	2022	2023	2024					
A. Manajemen Perubahan	1	Indeks Kepemimpinan Perubahan	1	<p>Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian dalam melaksanakan reformasi birokrasi;</p> <p>Perubahan pola pikir dan budaya kerja KESDM;</p> <p>Menurunnya resistensi terhadap perubahan;</p> <p>Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada KESDM</p>	<p>Komitmen yang kuat dari Agen Perubahan dan Unit di KESDM;</p> <p>Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;</p> <p>Tertanamnya nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari</p>	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2020	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2021	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2022	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2023	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2024				
						Koordinasi terkait Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2020-2024								
						Pembangunan dan Penguatan Kaidah Perilaku Utama Nilai-Nilai KESDM								
					Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2020-2024									
					Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kaidah Perilaku Utama Nilai-Nilai KESDM									
B. Deregulasi Kebijakan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	<p>Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;</p>	<p>Kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama</p>	<p>Mengidentifikasi Pemetaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Deregulasi Aturan yang menghambat birokrasi</p> <p>Evaluasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Penguatan sistem regulasi dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis hukum</p> <p>Perencanaan Regulasi/ Kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor</p> <p>Pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor</p>								
	2	Indeks Kualitas Kebijakan	2	<p>Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;</p> <p>Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha;</p>	<p>Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi KESDM</p>									
C. Penataan dan Penguatan Organisasi	1	Indeks Kelembagaan	<p>Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Setjen DEN</p> <p>Meningkatnya kapasitas organisasi Setjen DEN dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</p> <p>Terciptanya desain organisasi Setjen DEN yang mendukung kinerja;</p> <p>Berkurangnya jenjang organisasi Setjen DEN dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja;</p>	<p>Dilakukannya penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan</p> <p>Terpecahnya kondisi jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka pemyederhanaan organisasi</p> <p>Dilakukannya evaluasi kelembagaan berbasis kinerja</p>	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian ESDM	Evaluasi Kelembagaan sesuai Permen PAN 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Insansi Pemerintah				Evaluasi Kelembagaan sesuai Permen PAN 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Insansi Pemerintah				
					Koordinasi Pemyederhanaan Birokrasi 2 (dua) Level di lingkungan Kementerian ESDM melalui usulan perubahan SOTK Setjen DEN (R-Perpres SOTK tentang Setjen DEN)	Koordinasi tindak lanjut Pemyederhanaan Birokrasi 2 (dua) Level di lingkungan Kementerian ESDM melalui usulan perubahan SOTK Setjen DEN (R-Perpres SOTK tentang Setjen DEN)	Koordinasi Pemyederhanaan Birokrasi 2 (dua) Level di lingkungan Setjen DEN melalui usulan perubahan Tugas dan Fungsi Organisasi, serta uraian organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Setjen DEN	Koordinasi tindak lanjut Pemyederhanaan Birokrasi 2 (dua) Level di lingkungan Setjen DEN melalui usulan perubahan Tugas dan Fungsi Organisasi, serta uraian organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Setjen DEN		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pemyederhanaan Birokrasi 2 (dua) Level di lingkungan Setjen DEN				
					Koordinasi terkait Penyusunan dan Penetapan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian ESDM					Penyesuaian dan Penempatan Kembali Pegawai di lingkungan Setjen DEN sesuai dengan Peta Jabatan				
					Koordinasi penyusunan draft Peta Jabatan - peralihan jabatan pelaksana menuju jabatan fungsional					Koordinasi tindak lanjut penyusunan draft Peta Jabatan - peralihan jabatan pelaksana menuju jabatan fungsional				
					Koordinasi penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (Teknis) pada Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian ESDM									
					Koordinasi tindak lanjut penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (Teknis) di lingkungan Kementerian ESDM									
D. Penataan Tata Laksana	1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Setjen DEN</p>	<p>Peta Proses Bisnis mempengaruhi Pemyederhanaan Jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun Peta Proses Bisnis dengan adanya pemyederhanaan birokrasi</p>	Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis Organisasi	Evaluasi dan/atau Penyesuaian Peta Proses Bisnis dengan Rencana Strategis Organisasi	Tindak lanjut Penyesuaian Peta Proses Bisnis dengan Rencana Strategis Organisasi	Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis Organisasi						
					Peningkatan sistem aplikasi berdasarkan tugas dan fungsi					Monitoring pengintegrasian sistem aplikasi berdasarkan tugas dan fungsi	Evaluasi pengintegrasian sistem aplikasi berdasarkan tugas dan fungsi	Rekomendasi kebijakan pengintegrasian sistem aplikasi berdasarkan tugas dan fungsi		
					Koordinasi Integrasi sistem TIK	Koordinasi Integrasi sistem TIK (konsolidasi dan harmonisasi data)	Koordinasi Integrasi sistem TIK (pembangunan Big Data)		Koordinasi Integrasi sistem TIK (pengembangan Big Data)	Koordinasi Integrasi sistem TIK (pengembangan Bisnis Intelejen)				
					Koordinasi dalam Penyusunan Pedoman Standardisasi Pengelolaan Arsip Bentuk Khusus					Penyajian arsip menjadi informasi (digitalisasi arsip)				
					Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik		Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)		Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik					
					Koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan perbendaharaan		Koordinasi Pembangunan Sistem Monitoring Perbendaharaan dalam upaya peningkatan nilai KPA		Koordinasi pelaksanaan Sistem Monitoring Perbendaharaan		Monitoring dan evaluasi Sistem Monitoring Perbendaharaan			
					1 Penguatan kompetensi penyusun laporan keuangan 2 Penguatan pengendalian intern pada laporan keuangan 3 Monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan									
					Peningkatan Kompetensi Pengelola BMN		Koordinasi pelaksanaan pengelolaan BMN		Koordinasi Inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian ESDM		Koordinasi dalam evaluasi dan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian ESDM		Koordinasi dalam penyempurnaan kodefikasi BMN dan penyempurnaan SIMAK BMN	

Area Perubahan	No	Indikator	Nilai yang diharapkan	Materi Substantif	Keputusan							
					2020	2021	2022	2023	2024			
E Penataan Sistem Manajemen SDM	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya ketataan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; 2 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; 3 Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; 4 Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; 5 Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2 Penetapan kinerja individu 3 Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai 	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pegawai melalui peningkatan pendidikan akademis dan/atau pendidikan dan pelatihan							
					Koordinasi penyusunan kebijakan dan aplikasi Penilaian Kinerja		Implementasi/ pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja					
					Internalisasi aturan disiplin, kode etik/kode perilaku pegawai, serta monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin							
	2	Indeks Merit Sistem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 2 Proses Penempatan Pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 5 Penetapan kinerja individu 6 Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai 7 Pelaksanaan evaluasi jabatan 8 Sistem Informasi Kepegawaian 9 Assessment Pegawai # Penempatan Jabatan # Manajemen Talenta # Pemberian reward and punishment 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 2 Proses Penempatan Pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 5 Penetapan kinerja individu 6 Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai 7 Pelaksanaan evaluasi jabatan 8 Sistem Informasi Kepegawaian 9 Assessment Pegawai # Penempatan Jabatan # Manajemen Talenta # Pemberian reward and punishment 	Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024		Koordinasi Pembangunan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai		Implementasi/pelaksanaan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai			
					Koordinasi dalam Pengembangan dan Implementasi penggunaan Sistem Informasi Seleksi Calon ASN di lingkungan KESDM							
					Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pegawai melalui peningkatan pendidikan akademis dan/atau pendidikan dan pelatihan							
					Koordinasi dalam Penyusunan R-Permen ESDM tentang Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi		Penetapan, Sosialisasi/Implementasi, dan Implementasi/ Pelaksanaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi		Implementasi/ Pelaksanaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi	
					Koordinasi penyusunan kebijakan dan aplikasi Penilaian Kinerja		Implementasi/ pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja					
					Internalisasi aturan disiplin, kode etik/kode perilaku pegawai, serta monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin							
1 Koordinasi dalam Penyusunan draft Informasi Jabatan		1 Koordinasi dalam Penyusunan Penyesuaian draft Informasi Jabatan - menuju Jabatan Fungsional										
2 Koordinasi dalam Penyusunan draft Informasi Faktor Jabatan		2 Koordinasi dalam Penyusunan Penyesuaian draft Informasi Faktor Jabatan - menuju Jabatan Fungsional										
3 Koordinasi dalam Penyusunan draft Peta Jabatan		3 Koordinasi dalam Penyusunan Penyesuaian draft Peta Jabatan - menuju Jabatan Fungsional										
3		4										
		Koordinasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan								
		Koordinasi dan Implementasi/ Pelaksanaan Assessment Kompetensi Manajerial dan Sosio-kultural Pegawai		Koordinasi dan Implementasi/ Pelaksanaan Assessment Kompetensi Teknis Pegawai								
		Koordinasi dalam rangka pemyederhanaan birokrasi 2 level melalui usulan transformasi jabatan Administrasi dan/atau Pelaksana ke Jabatan Fungsional		Koordinasi dalam rangka pemyederhanaan birokrasi 2 level melalui usulan transformasi jabatan Administrasi dan/atau Pelaksana ke Jabatan Fungsional								
		Koordinasi dalam Penyusunan R-Permen ESDM tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi		Sosialisasi/ Internalisasi, serta Implementasi/ Pelaksanaan kebijakan tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi		Implementasi/ Pelaksanaan kebijakan tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi						
3	Indeks Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2 Penetapan kinerja individu 3 Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai 4 Sistem Informasi Kepegawaian 5 Manajemen Talenta 6 Penempatan Jabatan 7 Pemberian reward and punishment 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2 Penetapan kinerja individu 3 Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai 4 Sistem Informasi Kepegawaian 5 Manajemen Talenta 6 Penempatan Jabatan 7 Pemberian reward and punishment 	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pegawai melalui peningkatan pendidikan akademis dan/atau pendidikan dan pelatihan								
				Koordinasi penyusunan kebijakan dan aplikasi Penilaian Kinerja		Implementasi/ pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja						
				Internalisasi aturan disiplin, kode etik/kode perilaku pegawai, serta monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin								
				Koordinasi dan Pemutakhiran data kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian								
				Koordinasi dalam Pemetaan Talenta berdasarkan hasil assessment kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan/atau teknis, serta penitaaan kinerja pegawai								
				Koordinasi dalam rangka pemyederhanaan birokrasi 2 level melalui usulan transformasi jabatan Administrasi dan/atau Pelaksana ke Jabatan Fungsional								
		Koordinasi dalam Penyusunan R-Permen ESDM tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi		Sosialisasi/ Internalisasi, serta Implementasi/ Pelaksanaan kebijakan tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi		Implementasi/ Pelaksanaan kebijakan tentang penghargaan terhadap pegawai berprestasi						
F Penguatan Akuntabilitas	1	Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya Komitmen Pimpinan dan Jajaran Pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekecil kerja subntas semata 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien melalui perhitungan jumlah program/ kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama unit 	1 Koordinasi terkait Kebijakan Penyusunan Perencanaan Penganggaran, serta monitoring dan evaluasi Kinerja							
					2 Koordinasi Penyusunan RKP (Tahunan)							
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	<ul style="list-style-type: none"> 2 Meningkatnya kemampuan Setjen DEN mengelola Kinerja organisasi 3 Meningkatnya kemampuan Setjen DEN dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi 4 Meningkatnya etektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Setjen DEN 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Persentase sasaran dengan capaian 100% mengelola Kinerja organisasi 3 Persentase Anggaran yang berhasil di refocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4 Telah dilakukannya aplikasi yang terintegrasi dalam pemanfaatannya untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran 5 Capaian/ Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi unit organisasi 6 Telah tersusunnya peta strategi yang menggiatkan pada kinerja utama (berangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai 	1 Koordinasi dalam penyusunan Cascading Kinerja		1 Updating Cascading Kinerja berdasarkan isu-isu strategis		2 Monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi			
					1 Koordinasi terkait Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan di lingkungan Kementerian ESDM							
					2 Penguatan kompetensi dari penyusun laporan keuangan							
					3 Penguatan pengendalian intern atau signilifikan pada laporan keuangan							
					4 Koordinasi dalam peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Terpenuhi WTP							
					Pernyempunaan dan/atau pengembangan aplikasi e-Lapik Setjen DEN							
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi												
		1 Koordinasi Penyusunan Peta Strategi Setjen DEN		2 Koordinasi dalam penyusunan Cascading Kinerja		Updating Cascading Kinerja berdasarkan isu-isu strategis						

Area Perubahan	No.	Indikator	Nilai yang ditargetkan	Materi Keberhasilan	Keputusan				
					2020	2021	2022	2023	2024
G Penguatan Pengawasan	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara	1 Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) - Tahunan				
					Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) - Tahunan				
					Penguatan implementasi SPIP (Risk Register)				
					Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat				
					1 Koordinasi Pembangunan Zona Integritas 2 Penguatan Pengendalian Gratifikasi 3 Penguatan implementasi SPIP (Risk Register) 4 Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Koordinasi terkait kebijakan Whistle Blowing System 1 Penguatan kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2 Koordinasi dalam Penguatan Kebijakan dan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian ESDM				
H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)	1 Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada : - kesesuaian persyaratan - kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur - ketepatan waktu penyelesaian - kelengkapan biaya/ tarif, Gratis - kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan - kompetensi dan perilaku pelaksana pemberi pelayanan/ web - kualitas sarana dan prasarana - penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelaksanaan inventarisasi inovasi perubahan (inovasi terhadap pelayanan)	Penyempurnaan dan/atau pengembangan terhadap inovasi perubahan (inovasi terhadap pelayanan)			
						Monitoring dan Evaluasi implementasi/ pelaksanaan (pelayanan)			
						Monitoring dan Evaluasi Penanganan pengaduan pelayanan			
			2 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	2 Upaya dan/atau inovasi pelayanan telah dipermudah : - waktu lebih cepat - alur lebih pendek/singkat - terintegrasi dengan aplikasi		Monitoring dan Evaluasi implementasi/ pelaksanaan (pelayanan)			
				3 Penanganan pengaduan pelayanan dan korupsi dilakukan melalui berbagai kanal/ media secara responsif dan bertanggung jawab.		Monitoring dan Evaluasi Penanganan pengaduan pelayanan			